

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Menurut kodratnya, manusia mempunyai hasrat untuk hidup bersama, yaitu hidup bermasyarakat. Sebagaimana yang dikatakan oleh Aristoteles bahwa manusia adalah mahluk sosial (*zoon politicon*). Dalam kehidupan bermasyarakat, masing-masing dari individu mempunyai kebutuhan yang berbeda dan selalu ingin diutamakan. Perbedaan ini terkadang dapat menimbulkan konflik di dalam tatanan masyarakat tersebut. Maka dari itu perlu adanya sistem yang digunakan untuk melindungi kepentingan-kepentingan individu dalam masyarakat.<sup>1</sup> Salah satu sistem yang dianggap terbaik dalam hal ini ialah demokrasi.<sup>2</sup>

Substansi adalah terjaminnya kemerdekaan rakyat untuk memilih pemimpin atau system politik formal secara bebas dan sekaligus untuk menjatuhkannya jika terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan konstitusi.

Indonesia sebagai salah satu negara yang menganut asas demokrasi sangat berkepentingan untuk membangun masyarakat yang demokratis, menjunjung tinggi keadilan, kebebasan, dan persamaan, baik antar suku, etnis, tujuan dan juga pemikiran. Untuk dapat memenuhi hal tersebut, salah satu langkah yang harus dilakukan ialah memperbaiki sistem pada sektor pendidikan.

Indonesia sebagai bangsa termasuk yang beuntung karena sejak awal mayoritas masyarakatnya telah memilih system demokrasi, dengan rakyat yang

---

<sup>1</sup>Rizky Ariestandi Irmansyah, *Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Demokrasi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), h. 1-7.

<sup>2</sup>A. Ubaidillah dan Abdul Razak dkk, *Pendidikan Kewargaan (Civic Education) Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, (Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2007), h. iii.

mayoritas muslim hampir tidak ada yang alergi terhadap demokrasi, berkat didikan yang diberikan oleh pemimpinnya. Kenyataan ini merupakan modal penting untuk dikembangkan lebih jauh secara bertanggung jawab. Adapun buahnya masih belum seperti yang diharapkan karena kesalahan dan kelemahan pemimpin itu sendiri dalam praktik politik, dalam sebuah fakta yang tidak boleh diabaikan. Upaya perbaikan sistem ini harus diperbaiki secara terus-menerus tanpa merasa bosan, sekalipun hasil sering menyakitkan dan melelahkan, secara ringkas dapat dijelaskan bahwa pasang surutnya pelaksanaan demokrasi di Indonesia berkaitan erat dengan perilaku elitnya. Apakah mereka berhati lapang, atau malah berhati sempit dan tidak bertanggung jawab.

Demokrasi dewasa ini dipahami secara beragam oleh berbagai kelompok kepentingan yang melakukan teoritisasi dari perspektif dan untuk tujuan tertentu. Keragaman konsep tersebut, meskipun terkadang juga sarat dengan aspek-aspek subyektif dari siapa yang merumuskannya, sebenarnya bukan sesuatu yang harus dirisaukan. Karena, hal itu sesungguhnya mengisyaratkan esensi demokrasi itu sendiri yaitu adanya perbedaan pendapat.

Satu hal yang baca dari berbagai studi penelusuran demokrasi bahwa ia tumbuh sejalan dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat. Semakin tinggi tingkat kompleksitas maka semakin rumit dan tidak sederhana pula demokrasi didefinisikan. Salah satu hasil akomodasi pendefinisian demokrasi terhadap tingkat perkembangan masyarakat adalah semakin tergesernya kriteria partisipasi langsung rakyat dalam formulasi kebijakan, yang menjadi kriteria pertama Pericles, oleh model perwakilan. Selain itu penempatan posisi dan peran

penguasa atau Negara juga senantiasa mengalami pendefinisian ulang, bergeser dari posisi dan peran “penjaga malam” atau “pemadam kebakaran” ke arah posisi dan peran yang lebih besar dan menentukan.

Sejak dekade terakhir ini, hubungan Islam dan demokrasi selalu dibicarakan. Tidak saja di negara-negara Arab (Timur Tengah) yang menjadi tempat lahirnya Islam, tetapi juga di negara-negara Barat yang menjadi tempat lahirnya demokrasi. Perdebatan penting yang berlangsung mengenai Islam dan demokrasi selalu saja melibatkan doktrin Islam yang tampak tidak tegas, apakah Islam mendukung demokrasi secara keseluruhan atau hanya sebagian saja. Bahkan, dapat dipertanyakan lebih lanjut, benarkah Islam tidak sesuai (*compatible*) dengan demokrasi sebagai sistem politik modern. Inilah pertanyaan-pertanyaan penting menyangkut hubungan Islam dengan demokrasi.

Islam merupakan agama universal mengandung prinsip-prinsip hak asasi manusia sebagai sebuah konsep ajaran, Islam memposisikan manusia pada kedudukan yang setara dengan manusia yang lainnya. Perbedaan individu satu dengan individu lainnya hanya didasarkan pada kualitas keimanan dan ketaqwaannya. Hal ini merupakan dasar yang sangat kuat dan tidak dapat dipungkiri telah memberikan kontribusi pada perkembangan prinsip-prinsip hak asasi manusia di dalam masyarakat internasional.

Alquran sebagai *way of life* bagi umat Islam tidak diragukan lagi akan kebenaran kandungannya serta salah satu tujuannya untuk menegakkan sebuah tatanan masyarakat yang adil dan sejahtera berdasarkan etika dalam kehidupan manusia. Hak asasi dan demokrasi adalah dua hal yang saling terkait satu sama

lainnya. Tidak ada demokrasi tanpa adanya hak asasi manusia, begitu juga sebaliknya bahwa hak asasi manusia tidak akan survive tanpa adanya demokrasi. Dengan kata lain bahwa eksistensi demokrasi berkaitan dengan eksistensi hak asasi manusia.

Manusia mempunyai kedudukan tinggi dalam kosmologi sehingga ia harus diperlakukan secara proporsional pada posisi yang mulia. Manusia mempunyai hak dan kapabilitas untuk menjadi khalifah *fi al-ardh* sebagaimana yang tersirat dalam Alquran. Sebelum seorang individu dilahirkan dan wafat, ia mempunyai hak-hak yang diformulasikan dan dilindungi oleh hukum. Allah memuliakan manusia dan menjadikannya makhluk yang paling sempurna. Sebagaimana dilansir dalam Alquran Surat ke 17 ayat ke 70, *“Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam, kami angkat mereka di daratan dan lautan, kami beri mereka rizki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan.”*

Islam sebagai agama *rahmatan li al-‘alamin* dan penutup dari agama-agama samawi tentu saja mempunyai banyak konsep kelebihan tertentu tentang tatacara kehidupan, diantaranya konsep yang tertanam dalam Alquran adalah tentang syūrā yang populer dengan musyawarah.

Islam sendiri pada dasarnya adalah demokrasi. Hal ini didasarkan pada beberapa hal. Pertama, Islam adalah agama hukum dengan pengertian agama Islam berlaku bagi semua orang tanpa memandang kelas, struktur sosial masyarakat dari kalangan atas hingga kalangan bawah, dari kaum borjuis hingga proletar, semuanya diberlakukan sama di hadapan hukum. Kedua, Islam memiliki

asas permusyawaratan (*syura*). Artinya seluruh perkara-perkara yang dihadapi dibicarakan bersama di antara mereka. Dengan demikian tradisi membahas, duduk bareng, bersama-sama mengajukan argumentasi dan berdiskusi untuk sebuah kesepakatan merupakan salah satu aktivitas yang ada dalam demokrasi. Ketiga, Islam selalu berpandangan memperbaiki kehidupan. Hal ini sebenarnya merupakan prinsip demokrasi, dimana demokrasi bertujuan untuk menciptakan perbaikan dalam hidup. Oleh karena itu menurut Fazlurrahman, Islam adalah agama perbaikan (*din al-ishlah*) atau agama inovasi.<sup>3</sup>

Pendidikan politik diharapkan dapat membangun kesadaran masyarakat untuk memilih secara profesional dan selektif sehingga dapat dipertanggung jawabkan apa yang sudah dipilih karena tujuan dari pendidikan politik antara lain adalah membangkitkan kesadaran warga negara akan hak politiknya terutama dalam mengikuti proses pemilihan umum, dengan menggunakan hak suara secara bebas dan mengajarkan seseorang untuk mewujudkan negara yang menganut sistem demokrasi.

Berbicara demokrasi maka tidak akan lepas dari dunia politik dan pemerintahan. Demokrasi menjadi salah satu sistem politik Islam yang turut didiskusikan di negara-negara Islam, bahkan ini telah diterima dan digunakan oleh hampir seluruh pemerintahan di dunia, bahkan pemerintahan otoriter pun menggunakan atribut “demokrasi” untuk memberikan ciri kepada rezim dan aspirasi mereka. Akibatnya adalah menjamurnya penggunaan kata demokrasi seperti “demokrasi liberal”, “demokrasi sosial”, “demokrasi terpimpin” dan

---

<sup>3</sup>Fazlur Rahman, *Tema Pokok Alquran, terj. Anas Mahyuddin*, (Bandung : Pustaka, 1995), h..54.

sebagainya. Sebagaimana Fukuyama dalam bukunya *The End of History and The Last Man*, mengatakan bahwa demokrasi liberal paling tidak dalam pengertian pemilihan umum plus jaminan HAM merupakan satu-satunya bentuk pemerintahan yang bertahan dan lebih dekat pada sifat manusia. Karena tujuan agung demokrasi adalah pengakuan terhadap martabat dan kebebasan manusia dan adanya korelasi yang tinggi antara demokrasi dan kesejahteraan (yakni menawarkan jalan keluar dari kemiskinan): dua hal yang dalam sejarah manusia diperjuangkan secara konstan. Maka, sudah sewajarnya jika saat ini demokrasi menjadi pilihan mayoritas negara di dunia.

Ada pendapat bahwa demokrasi belum lama digunakan dalam khazanah pemikiran dunia Islam, meski sebenar inhern dan sejalan dengan ajaran Islam. Namun ada pula yang berpandangan bahwa ajaran Islam bertumpu pada konsepsi "kedaulatan Tuhan", sehingga demokrasi yang bermakna "kedaulatan sepenuhnya di tangan rakyat" kurang sesuai dengan pemikiran politik Islam.<sup>4</sup>

Karena itulah dalam masyarakat Islam, terdapat petunjuk yang cukup kuat bahwa sebagian dari para ulama dan para penguasa politik berpandangan bahwa dalam Islam tak ada tempat yang layak bagi paham demokrasi. Demokrasi sebagai azas dan yang dipergunakan dalam kehidupan ketatanegaraan berasal dari zaman Yunani. Demokrasi tersebut terdiri dari dua perkataan, yaitu demos yang berarti rakyat dan cratein yang berarti pemerintah.

Dengan demikian dilihat dari arti kata-katanya demokrasi adalah pemerintahan rakyat, yang kemudian diartikan pemerintahan dari rakyat oleh

---

<sup>4</sup>Bahtiar Effendy, *Islam, Negara dan Demokrasi di Indonesia*, Harian Republika pada kolom artikel tanggal 13 September 2022.

rakyat dan untuk rakyat. Meskipun ditinjau dari arti kata-katanya hal itu kelihatan sederhana, akan tetapi sampai sekarang adalah sukar untuk memberikan batasan yang dapat diterima oleh semua pihak. Hal itu disebabkan pengertian demokrasi tersebut telah dan akan mengalami perkembangan.<sup>5</sup>

Dari keterangan di atas, maka pada intinya secara harfiah, demokrasi (*demos-kratos*) berarti kekuasaan berada dalam genggaman rakyat. Sedangkan doktrin Islam mengatakan bahwa hanyalah Tuhan yang memiliki kekuasaan. Lebih dari itu sebagian ulama juga mengklaim bahwa Islam adalah agama yang serba komplit, yang mengatur seluruh aspek kehidupan ini. Bagi seorang Muslim, tak ada aturan hidup kecuali yang telah didekritkan Tuhan dalam Kitab Suci Alquran, dan ucapan Rasul Muhammad Saw. Begitu komplit dan detailnya ajaran Islam sehingga seorang Muslim tinggal pasrah mengikuti petunjuk Alquran dan Hadis dalam segala aspek hidupnya.

Oleh karenanya demokrasi yang memiliki dalil bahwa legitimasi kekuasaan bersumber dari mayoritas rakyat tidak bisa diberlakukan. Justru sejarah menunjukkan bahwa para Rasul Tuhan selalu merupakan kekuatan minoritas yang melawan suara arus mayoritas. Bukankah Alquran sendiri berulang kali memuji golongan minoritas yang tercerahkan, lantaran kebanyakan manusia pada umumnya cenderung korup dan sesat.<sup>6</sup>

Dalam hubungan agama dan demokrasi, Bachtiar Effendi mempunyai pandangan bahwa meskipun Alquran hanya memuat prinsip-prinsip kehidupan

---

<sup>5</sup>Sri Soemantri Martosoewignjo, *Pengantar Perbandingan Antar Hukum Tata Negara*, (Jakarta: CV.Rajawali, 1981), h. 25.

<sup>6</sup>Komaruddin Hidayat, *Tiga Model Hubungan Agama dan Demokrasi dalam Elza Peldi Taher (ed), Demokratisasi Politik Budaya dan Ekonomi: Pengalaman Indonesia Masa Orde Baru*, (Jakarta: Paramadina, 1994, h. 192



secara global, tetapi kitab suci itu telah menunjuk adanya demokrasi. Menghubungkan agama dan demokrasi hendaknya jangan ditentukan oleh ada tidaknya demokrasi itu secara *legalistic* dan *formalistic*, namun hendaknya dilihat dari dimensi yang lebih substantive.<sup>7</sup>

Dalam memahami ayat tersebut, penulis merujuk pada tafsir al-Azhar karya Hamka. Hamka merupakan salah satu mufassir yang fenomenal dalam sejarahnya, beliau di kenal luar biasa dengan karyanya yaitu tafsir al-Azhar di Indonesia bahkan di mancanegara. *Tafsir al-Azhar* ini menjadi sebuah karya monumental dari seluruh karyanya. *Tafsir al-Azhar* pada mulanya merupakan materi yang di sampaikan dalam acara kuliah subuh yang diberikan oleh Hamka di masjid Agung al-Azhar Kebayoran, Jakarta sejak tahun 1959. Ketika itu masjid tersebut belum dinamakan masjid al-Azhar.<sup>8</sup>

Dalam waktu yang sama bulan Juli 1959 Hamka bersama KH. Fakhri Usman H.M. Yusuf Ahmad (Menteri Agama dalam kabinet Wilopo 1952, Wafat tahun 1968 ketika menjabat ketua Muhammadiyah) menerbitkan majalah “Panji Masyarakat” yang menitik beratkan soal-soal kebudayaan dan pengetahuan Agama Islam.<sup>9</sup>

Berdasarkan latar belakang yang telah diulas panjang lebar ini, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang demokrasi dalam perspektif Alquran. Maka oleh sebab itu, di sini penulis mengangkat judul penelitian skripsi ini

---

<sup>7</sup>Bahtiar Effendi, *Demokrasi Dan Agama: Eksistensi Agama dalam Politik Indonesia, dalam Zainul Kamal, et all, Islam Negara & Civil Society Gerakan dan Pemikiran Islam Kontemporer*, (Jakarta: Paramadina, 2005), h. 162-163

<sup>8</sup>Nama masjid Al-Azhar diberikan oleh Syekh Mahmud Syaltut Rektor Universitas AlAzhar dalam acara kunjungan ke Indonesia. (Hamka, *Tafsir Al-Azhar*) h. 48.

<sup>9</sup>Yunan Yusuf, *Corak Pemikiran Kalam Tafsir Al-Azhar*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1990), h. 77.



dengan judul **“Konsep Demokrasi Dalam Tafsir Al-Azhar (Analisis Q.S. Ali-Imran ayat 159 dan Al-Maidah ayat 8)”**.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka peneliti akan merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana konsep Demokrasi dalam ajaran Islam?
2. Bagaimana penafsiran ayat-ayat Demokrasi dalam Q.S. Ali Imran ayat 159 dan Al-Maidah ayat 8 menurut Tafsir Al-Azhar?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan di atas, maka peneliti akan memberikan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui konsep demokrasi dalam ajaran Islam dan Alquran.
2. Untuk mengetahui konsep nilai-nilai demokrasi dalam Q.S. Ali Imran ayat 159 dan Al-Maidah ayat 8 menurut Tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka.
3. Untuk mengetahui kontribusi buya Hamka bagi perkembangan umat Islam.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan berguna dan bermanfaat antara lain :

- a. Bagi segenap civitas akademika UINSU Medan, khususnya mahasiswa Ilmu Alquran dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam sebagai bahan rujukan atau referensi untuk melakukan kajian atau penelitian lebih lanjut.
- b. Menambah khasanah pengetahuan Islam, khususnya bidang Demokrasi dalam Alquran.

## E. Kajian Pustaka

Melakukan Penelitian tentang demokrasi pendidikan perlu kiranya dilakukan telaah terhadap studi-studi yang sudah dilakukan sebelumnya. Hal ini dimaksudkan untuk melihat relevansi dan sumber-sumber yang akan dijadikan rujukan dalam penelitian ini dan sekaligus sebagai upaya menghindari plagiat dan duplikasi.

Sejauh pengamatan peneliti, ada beberapa skripsi yang relevan dengan penelitian ini, diantaranya adalah :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Yuyun Affandi, dengan judul "*Konsep Demokrasi Menurut Pandangan Hamka dalam Tafsir Al-Azhar*". Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa Hamka adalah seorang pujangga, ulama, pengarang dan politikus. Ia pernah berguru pada berbagai tokoh pergerakan Islam. Semasa hidupnya ia banyak mengarang buku, baik dalam bidang sastra, sejarah, filsafat, tasawuf, riqh, roman dan lain sebagainya. Karya terbesarnya berupa kitab Tafsir Alquran yang beliau beri nama "*Kitab Tafsir al-Azhar*".<sup>10</sup>
2. Penelitian yang dilakukan oleh Nurul Zuriah dan Hari Sunaryo yang berjudul "*Analisis Model Teoritik Inovasi Pembelajaran Ilmu Sosial Berbasis Demokratisasi di Lingkungan Pendidikan Dasar*". Penelitian ini berangkat dari permasalahan yang ditemui dalam proses pembelajaran ilmu sosial yang cenderung menggunakan pendekatan monolitik dan bersifat top down. Sebagai akibatnya, ilmu sosial hanya memiliki kontribusi yang amat

---

<sup>10</sup>Yuyun Affandi, "*Konsep Demokrasi Menurut Hamka dalam Tafsir Al-Azhar*", *Laporan Penelitian Individu*, (Semarang: IAIN Walisongo, 2010), h. 70-71.

kecil dalam pengembangan individu dan masyarakat yang demokratis.<sup>11</sup>

3. Karya ilmiah lain yang membahas demokrasi adalah skripsi Agus Dwiyono (2007) berjudul, “*Pemikiran Bung Hatta Tentang Demokrasi.*” Dalam tulisan skripsi tersebut sangat banyak merujuk pada buku biografi Bung Hatta. Meskipun secara nasional tulisan biografi Bung Hatta diterbitkan tahun 1979, namun isinya ditulis sendiri oleh Hatta kira-kira semenjak ia umur dua puluh dua tahun. Fokus dari penulisan tersebut dengan membahas nilai-nilai dan asas demokrasi di Indonesia dari pra kemerdekaan sampai pasca kemerdekaan. Jadi pembahasan dalam tulisan tersebut lebih pada demokrasi tidak sekedar asas berkehidupan, melainkan telah sengaja dipersiapkan sebagai landasan berbangsa semenjak pra kemerdekaan dan untuk dipergunakan sebagai identitas bangsa sampai kapanpun.

Itulah diantara beberapa karya yang telah peneliti temukan. Namun penulis belum menemukan Konsep Demokrasi di dalam Tafsir Al-Azhar dan penulis menekankan pada metodologi penafsiran ayat-ayat Alquran berkaitan dengan Konsep Demokrasi dalam tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka dan tafsir lainnya. Oleh karena itu, penulis akan membahas ayat-ayat Demokrasi demi mengisi kekosongan itu dengan menggunakan metode penelitian *library research* (metode kepustakaan). Sehingga skripsi dengan judul Konsep Demokrasi Dalam Tafsir Al-Azhar (Analisis Q.S. Ali-Imran ayat 159 dan Al-Maidah ayat 8) dianggap penting dilakukan.

---

<sup>11</sup>Nurul Zuriah dan Hari Sunaryo, *Inovasi Model Pembelajaran Demokratis Berperspektif Gender*, (Malang: UMM Press, 2008), h. 61-62.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis dari penelitian ini ialah penelitian pustaka (*library research*), yaitu riset yang dilakukan dengan membaca literatur, berupa buku-buku/majalah, jurnal, tafsir-tafsir dan sumber data lainnya. Jadi pengumpulan data dilakukan di perpustakaan atau di tempat lainnya yang tersimpan buku-buku serta sumber-sumber data terkait.<sup>12</sup>

Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif, yaitu penelitian menggunakan pendekatan naturalistik untuk mencari dan menemukan pengertian pengertian atau pemahaman tentang fenomena dalam suatu latar yang khusus.<sup>13</sup>

### 2. Sumber Data

Yang dimaksud sumber data dalam penelitian ialah subjek dari mana data dapat diperoleh. Sumber data penelitian kualitatif adalah tampilan yang berupa kata-kata lisan atau tertulis yang dicermati oleh peneliti, dan benda-benda yang diamati sampai detailnya agar dapat ditangkap makna yang tersirat dalam dokumen atau bendanya.<sup>14</sup> Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif kepustakaan (*library research*) yaitu buku serta literatur lainnya sebagai sumber data.

#### a. Sumber Primer

Sumber data utama atau primer dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata,

---

<sup>12</sup>J. Supranto, *Metode Riset Aplikasinya dalam Pemasaran*, (Jakarta: PT RINEKA CIPTA, 2003), h. 28.

<sup>13</sup>Tohirin, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling*, (Jakarta: PT RAJA GRAFINDO PERSADA, 2012), h. 2.

<sup>14</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010), h. 22-172.

dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Dalam penelitian ini sumber primer pengumpulan datanya ialah berupa ayat-ayat Tafsir Al-Azhar.<sup>15</sup>

#### b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau dokumen.<sup>16</sup> Dalam penelitian ini sumber sekunder pengumpulan datanya ialah buku-buku tafsir Alquran seperti karya Wahbah al-Zuhaili, *al-Tafsir al-Wasit*, Sayyid Quthb, *Tafsir fi Zilal al-Quran*, Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Bada'i al-Tafsir*, M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, serta buku-buku yang terkait dengan demokrasi.

#### 3. Teknik Pengumpulan Data

Jenis teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu studi dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti dan sebagainya.<sup>17</sup> Data yang akan penulis cari dalam penelitian ini ialah berupa penafsiran terhadap ayat-ayat Alquran yang berkaitan, serta catatan-catatan yang terkait dengan demokrasi.

#### 4. Teknik Analisis Data

Adapun analisis yang digunakan terhadap penelitian ini di antaranya:

##### a. Deskripsi

Yaitu merupakan metode penelitian dengan cara menguraikan secara

---

<sup>15</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2009), h. 157.

<sup>16</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: ALFABETA, 2010), h. 309.

<sup>17</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan...*, h. 274.

lengkap, teratur dan teliti terhadap suatu objek penelitian.<sup>18</sup> Cara kerjanya yaitu diawali dengan mengumpulkan, menyusun data menganalisis data. Dalam hal ini yang dianalisis adalah konsep demokrasi yang tertuang dalam Alquran.

#### b. Metode Tahlili

Penelitian ini menggunakan metode tafsir *maudhu'i*. yaitu dengan cara menghimpun ayat-ayat Alquran dalam surah yang sama, dan juga sama-sama memiliki struktur kalimat dalam bentuk jumlah *fi'liyah* atau jumlah *ismiyah*, kemudian mencari makna kosakata secara mendalam, menemukan karakteristik pemahaman yang diperoleh dari suatu jenis rangkaian kata dalam kalimat dan menemukan pengaruh bentuk rangkaian tersebut terhadap penafsiran dan hikmah yang didapatkan dari penerapan kaidah yang berlaku dalam jenis kalimat tersebut. Kitab-kitab yang menjadi sumber rujukan adalah kitab-kitab Tafsir, dan beberapa sumber lainnya dari buku-buku yang membahas tentang kaidah penafsiran dan kebahasaan baik tata bahasa Arab, Indonesia maupun kajian linguistik umum. Untuk selanjutnya menemukan pengaruh dan kesesuaian atau tidaknya redaksi penerjemahan untuk setiap kata serta memberikan alternatif redaksi penerjemahan yang lain jika diperlukan.

### G. Sistematika Pembahasan

**Bab Pertama**, berupa pendahuluan dalam bab ini mencakup semua komponen atau pembahasan dalam sub judul dalam proposal yang terdiri dari: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

---

<sup>18</sup>Soedarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), h. 116.

**Bab Kedua**, mengenai Biografi dalam bab ketiga ini penulis akan menguraikan telaah relevansi Tafsir Al-Azhar, serta urgensi dan metode Tafsir Al-Azhar.

**Bab Ketiga**, tentang tinjauan umum konsep demokrasi. Mencakup: pengertian demokrasi, ruang lingkup demokrasi, konsep demokrasi Islam dan barat.

**Bab Keempat**, mengenai pembahasan demokrasi perspektif Islam dan Alquran, serta Nilai-nilai demokrasi menurut Buya Hamka dan ulama tafsir lainnya.

**Bab Kelima**, merupakan penutup. Bab ini berisi kesimpulan, saran-saran, dan penutup.





